

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
No.5 ; TLD No.52;

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK :

- A) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal ini mengatur ketentuan penetapan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; B) bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 18 ayat (6) UU Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Hal-hal yang diatur dalam PERDA ini antara lain: a) Pengelola Keuangan Daerah; b) Penyusunan Rancangan APBD; c) KUA dan PPAS; d) RKA SKPD; e) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; f) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; g) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; h) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APBD; i) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; j) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah; k) Penyiapan DPA SKPD; l) Anggaran Kas dan SPD; m) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah; n) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; o) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah; p) Pengelolaan BMD; q) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan perubahan APBD; r) Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; s) Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; t) Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah; u) BLUD; p) Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; w) Informasi Keuangan Daerah; x) Pembinaan Dan Pengawasan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah(PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.
- 106 Halaman.